

**B. SURAT PERNYATAAN**

KOP SURAT ORKEMAS

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : .....(nama lengkap)  
Jabatan : Ketua/ sederajat  
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : .....
2. Nama : .....(nama lengkap)  
Jabatan : Sekretaris/ sederajat  
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

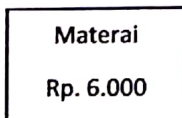
- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. Tidak dalam sengketa kepengurusan/tidak dalam perkara pengadilan
- c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/ berkas yang diserahkan;
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT; dan
- h. Bersedia apabila terjadi konflik kepengurusan surat keterangan pemberitahuan keberadaan ormas dicabut dan tidak berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/ paksan dari pihak manapun, bertanggung jawab dan bersedia dituntut secara hokum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

.....

Ketua,



Sekretaris,

(ditanda tangani)

(Cap stempel dan ditanda tangani)

(Nama Lengkap)

.....

(Nama Lengkap)

.....

- 12. Foto Kantor atau Sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- 13. Keabsahan kantor atau secretariat Orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak Atau jjin pakai dari pemilik/pengelola;
- 14. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
  - a. Tidak berfiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
  - b. Tidak dalam sengketa kepengurusan/ sengketa internal ormas atau tidak dalam perkara di pengadilan;
  - c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/ hak cipta pihak lain;
  - d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
  - e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
  - f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data, dan informasi dokumen atau berkas yang diserahkan; dan
  - g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.



**PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG HARUS DIPENUHI ORKEMAS  
SURAT PELAPORAN KEBERADAAN KEPENGURUSAN ORGANISASI  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Surat Pelaporan keberadaan kepengurusan Orkemas ditunjukkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Akte Pendirian atau statute Orkemas yang disahkan oleh notaris;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Tujuan dan Program Kerja Organisasi;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Orkemas Secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Biodata pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 , terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Surat Keterangan Domisili dan/ keberadaan organisasi dari Lurah/ Camat atau sebutan lainnya.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Surat legalitas / pengesahan   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM atau;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**ADA TIDAK**